



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 205/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 142/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR PROVINSI
PAPUA SELATAN TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
TAMBRAUW TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
MERAUKE TAHUN 2024**

ACARA

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

J A K A R T A

KAMIS, 16 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024
- Pemohon: M. Andrean Saefudin dan Salsabila

PERKARA NOMOR 205/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Saparuddin

PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Darius Gewilom dan Yusak Yaluwo

PERKARA NOMOR 142/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024
- Pemohon: Saparuddin

PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024
- Pemohon: Yohanis Yembra dan Petrus Yewen

PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024
- Pemohon: Thomas Kofiaga dan Pieter Mambrasar

PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024
- Pemohon: Hendrikus Mahuse dan Riduwan

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Kamis, 16 Januari 2025, Pukul 13.04 – 14.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2. Anwar Usman | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Dewi Nurul Savitri
2. Nallom Kurniawan
3. Supriyanto
4. Intan Permata Putri
5. Rizkisyabana Yulistyaputri

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 241/PHPU.GUB-XXIII/2025:**

1. Aji Satrio Pamungkas
2. Firmanto Laksana

B. Pemohon Perkara Nomor 185/PHPU.GUB-XXIII/2025:

M. Andrian Saefudin

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 238/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Nasrullah
2. Stefanus Timotius Talubun

D. Pemohon Perkara Nomor 231/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Thomas Kofiaga

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 231/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Yustian Dewi Widiastuti

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 215/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Moin Tualeka

G. Termohon:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Daniel Ndiwaen | (KPU Prov. Papua Selatan) |
| 2. Jufri Toatubun | (KPU Prov. Papua Selatan) |
| 3. Theresia Mahuse | (KPU Prov. Papua Selatan) |
| 4. Michael Sarawan | (KPU Kab. Merauke) |
| 5. Yulius Pabate | (KPU Kab. Tambrauw) |
| 6. Saharul Abdul Karim | (KPU Kab. Tambrauw) |
| 7. Izak Bofra | (KPU Kab. Tambrauw) |

H. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ana Rita Y. Ohee (KPU Prov. Papua Selatan)
2. Gabriel Naftali Jawok Epin (KPU Prov. Papua Selatan)
3. Lardin (KPU Prov. Papua Selatan)
4. Johanis H. Maturbongs (KPU Kab. Merauke)
5. Yudhistira Yoga Utama (KPU Kab. Tambrauw)
6. Rikopotan Gultom (KPU Kab. Tambrauw)
7. Grace Amelia Senggu (KPU Kab. Tambrauw)

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 241/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Abubakar Refra
2. Mohammad Tuhri Leisubun

J. Pihak Terkait Perkara Nomor 238/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Yoseph B. Gebze

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 238/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Betsy Rachel Imkotta

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 231/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muhamad Rizal
2. Frans Daniel Wattimena

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 215/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Hendra Jamlaay
2. Rahmat Taufit

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 142/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Melianus Paulus Yable
2. Ridwan Saleh Hasibuan

O. Bawaslu:

1. Yustina Weyrop (Prov. Papua Selatan)
2. Yeuw M. Felix Tethool (Prov. Papua Selatan)
3. Marman (Prov. Papua Selatan)
4. B. Tukidjo (Prov. Papua Selatan)
5. Ahmad Muhazir (Prov. Papua Selatan)
6. Xaverius Wonmut (Kab. Merauke)
7. Agustinus Mahuze (Kab. Merauke)
8. Johannis P. M. Manyambouw (Kab. Tambrauw)
9. Abudin Sangaji (Kab. Tambrauw)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.04 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam Perkara 241, 185, 205, 238, 231, 215, dan 142 PHPU Gubernur dan Bupati tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek, hanya cek ulang, ya, supaya hadir gitu saja. Perkara 241, Pemohon semuanya dulu. 241, hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [00:44]

Hadir.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:45]

Baik. 185?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. ANDREAN SAEFUDIN [00:49]

Hadir, secara daring, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:50]

Oh, dari daring.

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. ANDREAN SAEFUDIN [00:52]

Baik, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:52]

Baik. Dari mana ini?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. ANDREAN SAEFUDIN [00:57]

Dari Bandung, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:59]

Oh, dari Bandung. Ini kuasa, ya, atau Prinsipal?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. ANDREAN SAEFUDIN [01:05]

Prinsipal dari lembaga pemantau pemilih, Yang Mulia. Mohon izin.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08]

Oke, lembaga pemantau.
205? Tidak ada, ya? Oke. Sudah dicek tadi, enggak ada juga?
238?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [01:31]

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31]

Baik. 231?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:35]

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37]

215? Baik.
142? Pemohon 142? 142, Pemohon? Enggak ada? Baik.
Sekarang KPU. KPU Provinsi Papua Selatan?

16. KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y. OHEE [02:02]

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04]

Ada. Kemudian, KPU Kabupaten Merauke? Ya. Handphone-nya supaya dimatikan? Ya, sudah ada dibacakan Tatib-nya, handphone harus dimatikan. Kalau saya secara khusus malah mengatakan begini, handphone yang harganya murah, tidak boleh bunyi di sini. Tapi sambil bercanda. Kalau saya sendiri enggak punya handphone malah.

Merauke hadir, ya? Baik.

Tambrauw? Baik. Sudah semuanya.

Pihak Terkait 241?

Kemudian, Pihak Terkait 238?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: BETSY RACHEL IMKOTTA [02:51]

Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53]

Pihak Terkait 231?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [02:56]

Hadir, Yang Mulia.

21. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANS DANIEL WATTIMENA [02:56]

Hadir, Yang Mulia.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:57]

Yang mana ini, 231?

23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [03:01]

Ya.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03]

231 dan 238, sama? Yang 231, yang mana?

25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [03:09]

231, siap.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:10]

Oke. Yang 238? Oh, ada dua Kuasa Hukum.
215?

27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA JAMLAAY [03:22]

Hadir, Yang Mulia.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:23]

Mana? Oh, jangan keras-keras. Nanti miknya rusak, aset negara rusak itu. Ya, kamu kena pidana nanti, termasuk korupsi merusak aset negara itu.
Kemudian 142?

29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 142/PHPU.BUP-XXIII/2025: MELIANUS PAULUS YABLE [03:40]

Hadir, Yang Mulia.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:41]

Hadir. Nah, lembut ini, bagus.
Kemudian, sekarang Bawaslu. Bawaslu, Provinsi Papua Selatan.

31. BAWASLU: MARMAN [03:41]

Siap, hadir, Yang Mulia.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:53]

Baik. Bawaslu, Kabupaten Merauke?

33. BAWASLU: AGUSTINUS MAHUZE [03:57]

Siap, hadir, Yang Mulia.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:58]

Baik. Kabupaten Tambauw ... Bawaslu Tambrau? Baik. Hadir untuk tiga perkara, ya?

Baik. Agenda pada siang hari ini adalah penyampaian secara lisan Permohonan. Jadi, kita semua sudah dapat Permohonannya dan sudah mempelajari Permohonannya. Sehingga pada kesempatan siang hari ini, hanya menyampaikan pokok-pokoknya saja, tidak perlu disampaikan keseluruhan. Yang tidak dibacakan dan diungkapkan pada persidangan secara lisan, dianggap telah diucapkan, ya.

Kita mulai terlebih dulu dengan Perkara 241. Silakan, 241.

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [04:45]

Ya, izin, Yang Mulia.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:47]

Ya, silakan.

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [04:48]

Sebelum pemaparan, kami izin untuk menampilkan presen ... slide presentasi kami, sudah saya sampaikan sebelumnya.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:54]

Oke. Pakai slide, ya?

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [04:57]

Ya.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:58]

Kalau pakai slide itu ongkosnya lebih mahal. Ya, silakan.

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [05:04]

Ya. Ya, selamat siang, Yang Mulia.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:10]

Ya.

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [05:10]

Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:13]

Ya.

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [05:14]

Kami adalah Kuasa Hukum dari Pemohon Paslon Nomor Urut 1 dalam Pemilu Gubernur Provinsi Papua Selatan, atas nama Darius Gewilom dan Yusak Yaluwo.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:23]

Ya.

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [05:24]

Adapun yang menjadi objek Permohonan a quo adalah pemba ... Pembatalan Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Nomor 217, yang diumumkan pada tanggal 8 Desember 2024, pukul 16.17 WIT.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:38]

Ya.

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [05:39]

Ya. Selanjutnya, Permohonan ... Permohonan a quo masih dalam tenggat waktu pengajuan Permohonan karena objek keluar pada hari Minggu, 8 Desember 2024, dan batas waktu pengajuan Permohonan adalah 11 Desember 2024.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:53]

Ya.

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [05:53]

Pemohon meng ... telah mengajukan Permohonan pada Selasa, 10 Desember 2024, dan menyampaikan Perbaikannya pada hari Jumat, 13 Desember 2024 (...)

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:01]

13.

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [06:02]

Sehingga masih masuk.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:03]

Sehingga masih dalam tenggang waktu, ya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [06:06]

Ya.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:06]

Oke. Sekarang Legal Standing.

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [06:08]

Ya. Selanjutnya, berdasarkan objek Permohonan, total perolehan suara adalah 270.227 suara, dimana dimenangkan oleh Paslon Nomor Urut 4 dan Pemohon merupakan peroleh suara terbanyak ketiga dengan selisih 9.000 ... 90.580.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:24]

Oke.

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [06:24]

Dan oleh karenanya, Pemohon mengajukan Permohonan penundaan atau pengesampingan ketentuan ambang batas, sebagaimana Pasal 158 ayat (1) huruf a, dengan alasan sebagaimana akan Pemohon uraikan selanjutnya.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:36]

Ya.

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [04:36]

Ya. Adapun alasan pokok penundaan keberlakuan Pasal 158 dalam Permohonan a quo adalah karena tidak terpenuhinya syarat pencalonan untuk ... syarat pencalonan oleh Termohon karena Termohon tidak melaksanakan kewenangannya untuk memastikan kebenaran dokumen syarat khusus gubernur di Provinsi Papua sebagai orang asli Papua dalam pencalonan Paslon Nomor Urut 4, atas nama Apolo Safanpo dan Paslon Nomor Urut 3, atas nama Romanus Mbaraka, sehingga dalam hal ini merugikan Pemohon atas perolehan suara yang tidak sah karena seharusnya sejak awal keduanya dinyatakan tidak lolos syarat pencalonan.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:14]

Jadi, menurut ini ... PKPU, dan itu menurut putusan mahkamah, yang harus orang asli Papua itu tingkat mana, toh? Ha?

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [07:29]

Gubernur, Majelis.

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:30]

Calon apa? Calon gubernur?

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [07:32]

Ya.

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:33]

Oke. Kalau calon bupati/wali kota tidak, kan?

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [07:38]

Tidak.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:39]

Tidak. Kalau gubernur, harus orang asli Papua?

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [07:42]

Ya, betul.

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:43]

Ini ada dugaan bahwa ca ... Calon Gubernur Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 3 bukan orang asli Papua?

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [07:52]

Ya, betul.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:53]

Oke. Terus, sehingga itu pelanggaran persyaratan calon, ya?

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [07:59]

Ya.

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:59]

Oke. Meskipun tidak memenuhi ambang batas, tapi ini ada persoalan administrasi pada waktu persyaratan calon, ya?

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [08:06]

Ya.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:07]

Nanti direspons oleh KPU, ya, baik, dan juga Bawaslu nanti.

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [08:13]

Ya.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:14]

Pihak Terkait juga, lha, ini saya asli kok, dikatakan juga tidak asli, gitu, ya, nanti direspons semuanya.

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [08:21]

Baik.

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:22]

Silakan terus, selain itu apa lagi?

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [08:25]

Baik. Selanjutnya, sebelum masuk dalam dalil Pokok Permohonan, Pemohon hendak sampaikan pengertian orang asli Papua berdasarkan Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Otsus Papua, Pasal 2 Perdasus Nomor 6/2011 juncto Putusan MK Nomor 29 Tahun 2011, yang mana pengertian orang asli Papua adalah mereka yang ayah dan ibu berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli Provinsi ... di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat hukum adat di Papua, yang kemudian pengertiannya dijelaskan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29 Tahun 2011, yaitu dilakukan berdasarkan kriteria, mekanisme, dan prosedur yang dianut secara konsisten oleh masyarakat hukum adat bersangkutan, dimana yang bersangkutan telah mengikuti upacara inisiasi adat setempat sesuai tatanan masyarakat adat setempat.

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:19]

Oke.

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [09:20]

Baik, selanjutnya (...)

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:21]

Itu definisi orang asli Papua, ya?

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [09:24]

Ya.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:24]

Terus yang diduga tidak asli, orang asli Papua, gimana? Terus, silakan.

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [09:29]

Ya. Selanjutnya, yang menjadi dalil Pokok Permohonan adalah Apolo Safanpo (Calon Gubernur Nomor Urut 4) sebagai pemenang suara dan Romanus Mbaraka sebagai Calon Gubernur Nomor Urut 3 sebagai pemenang kedua tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai orang asli Papua karena:

1. Keduanya tidak memiliki keturunan ayah atau patrilineal dari suku asli di Papua.
2. Tidak pernah melakukan upacara inisiasi adat resmi oleh masyarakat adat Papua sebelum pencalonan.
3. Dokumen pencalonan sebagai orang asli Papua, yaitu Keputusan Majelis Rakyat Papua Selatan Nomor 162 Tahun 2023 tidak sah secara formil sebagai produk hukum MRP, yang mana uraiannya akan kami jelaskan satu per satu.

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:15]

Ya.

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [10:16]

Ya. Pertama, Apolo Safanpo bukan orang asli Papua atau OAP karena ayahnya yang bernama Shabakin Samad atau marga Samad adalah berasal dari Sulawesi dan nama belakang Safanpo dari Apalus ... dari Apolo Safanpo diambil dari marga ibu yang bernama Perpetua Jimom ... Jimomber Safanpo, penggunaan nama marga dari garis keturunan ibu ini juga telah melanggar ketentuan marga yang berlaku di Suku Asmat, asal marga Safanpo yang menganut garis keturunan secara patrilineal sebagaimana Pasal 1 butir 14 Perda Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2020.

Begitu pula bagi Romanus Mbaraka (Calon Gubernur Nomor Urut 3), dimana ayahnya adalah bernama Bernadus Kramayir atau marga Kramayir yang berasal dari Maluku dan ibu bernama Veronika Kairaf yang berasal dari Papua. Pemohon juga menemukan fakta, bahwa bahkan nama belakang Mbaraka dari Romanus Mbaraka bukan nama marga yang ada di suku-suku asli di Papua.

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:15]

Oke, terus?

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [11:19]

Selanjutnya Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka bukan orang asli Papua karena tidak pernah melaksanakan upacara insia ... inisiasi adat resmi yang menyatakan mereka diterima oleh masyarakat adat di Papua, Pemohon mendasari pengertian diterima oleh masyarakat hukum adat ini berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 29 Tahun 2009 ... 2011 yang ... mohon izin, Yang Mulia. Pemohon akan ajukan sebagai bukti tambahan karena sebelumnya belum sempat kami masukkan.

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:47]

Ya.

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [11:48]

Baik.

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:49]

Sudah masuk itu? Bukti tambahannya?

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [11:51]

Belum.

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:52]

Belum?

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [11:53]

Belum.

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:53]

Ya, bukti tambahan disampaikan paling lambat besok siang, ya?

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [11:59]

Siap.

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:59]

Supaya Para Pihak bisa melihat, inzage di sore harinya.

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [12:03]

Siap, Majelis.

102. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:03]

Ya. Paling lambat, lho, ya. Kalau di luar itu, sudah enggak bisa lagi.

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [12:08]

Ya, baik.

Selanjutnya yang ketiga. Dokumen syarat pencalonan yang didasari oleh Termohon, yaitu Keputusan MRP Papua Selatan Nomor 162 Tahun 2024 tentang Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Sebagai Orang Asli Papua kepada Pasangan Calon Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 adalah tidak sah sebagai produk hukum MRP. Karena tidak memenuhi syarat formil, yaitu ditandatangani atau disetujui oleh ketua dan wakil ketua sebagaimana diatur dalam Pasal 151 Peraturan MRP Papua Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MRP Papua Selatan (vide Bukti P-12).

104. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:46]

Ini yang tanda tangan hanya 1 orang?

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [12:48]

Ya, hanya ketua.

106. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:50]

Ketua?

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [12:51]

Ya, sedangkan (...)

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:53]

Wakil ketua enggak tanda tangan?

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [12:54]

Wakil ketua tidak ... tidak tanda tangan.

Baik. Selanjutnya Pemohon, mohon perkenan, Yang Mulia, untuk menga ... untuk ... untuk mengizinkan kami untuk mengajukan 11 bukti tambahan untuk mendukung pembuktian tidak terpenuhinya syarat pencalonan oleh Apolo Safanpo (Cagub Nomor Urut 4) sebagai pemenang.

110. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:20]

Sudah ada sekarang buktinya?

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [13:22]

Su ... kopinya belum ... belum kami siapkan, masih ada di bawah, Majelis. Nanti akan kami susulkan.

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:26]

Oke. Paling lambat besok pukul 12.00, ya?

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [13:28]

Ya, siap.

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:29]

Ya.

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [13:31]

Sebenarnya, di sini Pemohon hendak menguraikan satu per satu. Tapi adapun yang menjadi utama adalah Pemohon mendapatkan bukti tambahan, yaitu berupa undang-undang, peraturan syarat pencalonan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf q Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ya.

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:54]

Ya.

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [13:55]

Dimana bukti ... berdasarkan pasal tersebut membuktikan bahwa Termohon juga telah salah atau keliru dalam pemenuhan syarat pencalonan terhadap Apolo Safanpo. Karena seharusnya, Apolo Safanpo sebagai Penjabat Gubernur Provinsi Papua Selatan dilarang mengundurkan diri dan mencalonkan diri sebagai gubernur dalam pemilihan kepala daerah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf q juncto penye ... penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dimana dinyatakan secara tegas bahwa dalam penjelasan huruf q, *"Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota mengundurkan diri untuk*

mencalonkan diri menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota.”

118. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:44]

Oke.

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [14:46]

Lalu selebihnya, Pemohon hendak menyampaikan kopi ... bukti tambahan berupa kopi Berita Acara KPU Provinsi Papua Selatan Nomor 41 ... 410 Tahun 2024 dan juga kopi Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun ... Tahun 2024 di Provinsi Papua Selatan. Yang mana, untuk membuktikan adanya keberatan dari Pemohon dengan tidak ditandatanganinya Berita Acara Perhitungan Suara oleh Saksi Pemohon.

Lalu yang ketiga. Bukti tambahan berupa kopi Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2020 (...)

120. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:24]

Ini ... dalil ini sudah ada dalam Permohonan?

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [15:27]

Yang nomor ... yang poin 1 dan 2.

122. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:31]

Kalau anu ... belum ada, ya, itu, ya?

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [15:32]

Ya. Yang tadi (...)

124. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:33]

Jadi begini, tambahan dalil atau tambahan Petitum dan sebagainya, typo itu hanya boleh typo yang sifatnya minor di sini. Kalau itu yang tambahan substansi atau tambahan dalilnya, yang berupa dalil atau Petitum sudah tidak diperbolehkan pada persidangan ini.

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [15:58]

Baik.

126. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:58]

Tapi kalau hanya nambahkan alat bukti sebetulnya boleh.

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [16:01]

Boleh.

128. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:01]

Ya?

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [16:01]

Ya.

130. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:02]

Nanti kita lihat, kita nilai.

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [16:04]

Baik, Majelis.

132. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:04]

Ya, silakan, diteruskan.

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [16:06]

Ya. Selebihnya, bukti tambahan ini untuk memperkuat dalil tidak terpenuhinya syarat sebagai orang asli Papua, Majelis.

134. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:12]

Ya. Sudah cukup, ya, nanti dilanjutkan. Ada dalil yang lain lagi?

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [16:17]

Selebihnya, tadi putusan MK yang tadi saya katakan.

136. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:23]

Ya.

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [16:24]

Dan juga ada kopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 ... 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Masyarakat Adat, ini juga untuk mendukung dalil kami sebagai syarat orang asli Papua.

138. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:34]

Ya, ya.

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [16:36]

Dan selebihnya, sama.

140. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:37]

Petitum, ya, berarti, ya?

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [16:39]

Ya.

142. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:39]

Oke. Silakan Petitumnya.

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [16:41]

Izin, untuk dibacakan oleh rekan saya, Majelis.

144. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:43]

Ya, silakan.

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [16:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia dan semua.

Berdasarkan Pokok Permohonan tersebut, Pemohon mengajukan Petitum sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 217 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 16.17 WIT.
3. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Romanus Mbaraka, M.T., dan Albertus Muyak, S.E., M.Si., dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T., dan Paskalis Imadawa, S.Pd., tidak memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.
4. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama Drs. Romanus Mbaraka, M.T., dan Albertus Muyak, S.E., M.Si., dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Dr. Ir. Apolo Safan ... Safanpo, S.T., M.T., dan Paskalis Imadawa, S.Pd., berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 68 Tahun 2024, Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, tanggal 11 Oktober 2024, dan Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Nomor 121 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, tanggal 11 Oktober 2024.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Provinsi Papua Selatan, tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Drs. Romanus Mbaraka, M.T., dan Albertus Muyak, S.E., M.Si., dan Pasangan Calon Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T., dan Paskalis Imadawa, S.Pd.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

146. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:54]

Baik. Yang Mulia Prof. Enny, ada? Silakan, Prof.

147. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:01]

Sedikit saja ini. Karena isu utamanya ini, kan sebenarnya orang asli Papua (...)

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [19:05]

Betul.

149. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:05]

Yang tidak menurut ... apa namanya ... Permohonan Saudara itu tidak memen ... dipenuhi oleh calon gubernur dan wakil gubernur itu, ya. Selama ini, persyaratan terkait dengan orang asli Papua itu mekanismenya seperti apa?

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [19:21]

Ya. Izin, Yang Mulia.

151. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:24]

Ya.

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [19:25]

Di dalam ketentuan Otsus, di Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, ketentuan mengenai syarat orang asli Papua ini diberikan kewenangan penentuannya melalui persetujuan ... pertimbangan dan persetujuan dari (...)

153. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:36]

MRP?

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [19:37]

Majelis ... Majelis Rakyat Papua Selatan.

Lalu kemudian, pasal tersebut di ... sudah diuji materi melalui Putusan MK Nomor 29 Tahun 2011, dimana dikatakan berkekuatan hukum, dengan tambahan bahwa harus berdasarkan pengakuan dari masyarakat hukum adat.

Lalu kemudian, dijelaskan dalam pertimbangan melalui ... harus melalui suatu mekanisme yang dilakukan secara konsisten melalui dalam bentuk upacara inisiasi resmi adat dari masyarakat adat yang bersangkutan.

155. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:11]

Terkait dengan ini, pengakuan dari masyarakat adatnya, apakah memang sama sekali tidak ada?

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [20:17]

Dari fakta yang diberikan ... yang kami himpun, sampai saat ini tidak ada upacara inisiasi adat. Setidak-tidaknya sebelum pencalonan, Majelis.

157. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:27]

Ini kan sudah ada Perdasusnya juga (...)

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [20:28]

Ya.

159. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:29]

Soal itu. Ini tolong nanti dari KPU bisa dijelaskan mekanisme selama ini yang sudah dilakukan sekarang. Untuk ditambahkan dalam jawabannya besok, ya. Persoalan soal mekanisme bagaimana menentukan syarat berkenaan dengan orang asli Papua ini secara jelas, ya, baik dari undang-undangnya maupun Perdasusnya. Itu saja tambahannya nanti. Terima kasih.

160. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:53]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Ada lagi yang mau disampaikan Pemohon?

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [20:59]

Izin, Yang Mulia. Izin untuk koreksi identitas Pemohon. Ada typo sedikit atas nama Darius Guwilom. Itu harusnya Gewilom, G-E-W-I-L-O-M di halaman 2.

162. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:15]

Gewilom?

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [21:16]

Ya. Darius G-E-W-I-L-O-M.

164. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:20]

Oh, kurang ... kurang E berarti, ya?

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [21:21]

Ya. U jadi E.

166. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:23]

G-E-U-W (...)

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [21:25]

U-nya jadi E, Yang Mulia.

168. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:27]

Oh, U-nya ganti E? Ya, baik.

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [21:29]

Ya, itu saja. Terima kasih.

170. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:29]

Baik. Cukup?

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [21:34]

Cukup.

172. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:35]

Ada beberapa catatan sekaligus untuk Pihak Terkait. Pemohon itu 9 dari 10 kuasa, KTA-nya sudah habis masa berlakunya.

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [21:49]

Ya, Majelis.

174. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:51]

Ya, nanti supaya enggak dikatakan sebagai advokat bodong, ya, harus dilengkapi, ya!

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [21:58]

Siap, Majelis.

176. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:59]

Namanya punya SIM, tapi SIM-nya sudah enggak berlaku itu. Ya, nanti diserahkan yang diperbarui sudah ... ongkosnya mahal ndak? Memperbarui?

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [22:11]

Enggak, Majelis.

178. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:13]

Masa Kuasa Hukum enggak punya duit untuk memperpanjang. Nanti saya mintakan, Yang Mulia Prof. Anwar nanti. Ya nanti di ... anu. Terus kemudian soft file daftar alat bukti tidak bisa dibuka.

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [22:30]

Oke.

180. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:32]

Nanti dibaru, ya! Soft file daftar alat buktinya. Nanti diselesaikan di bawah.

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [22:38]

Siap.

182. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:41]

Ya. Untuk Pihak Terkait juga KTA-nya sudah tidak berlaku atas nama Abu Bakar dan Risalfon. Supaya diperbarui, ya!

Baik. Saudara Pemohon itu mengajukan dua alat bukti, yang tertanggal 10 Desember 2024, P-1 sampai dengan P-16. Terus kemudian yang 13 Desember pas Perbaikan (...)

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [23:09]

Ya.

184. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:09]

P-1 sampai dengan P-13. Ini yang dipakai yang mana ini?

185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [23:13]

Yang 13 Desember, Majelis.

186. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:17]

Yang 10 Desember dianggap tidak berlaku?

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [23:18]

Ya.

188. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:18]

Tidak dipakai?

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [23:20]

Ya.

190. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:21]

Berarti ini P-1 sampai dengan P-13, yang dipakai?

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [23:23]

Ya. Dengan (...)

192. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:24]

Daftar bukti yang diserahkan pada tanggal 13 Desember 2024, ya?

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [23:28]

Ya.

194. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:29]

Oke.

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [23:29]

Dan akan ada bukti tambahan lagi, Majelis, nantinya.

196. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:31]

Nah, itu nanti bukti tambahan disahkan kemudian.

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [23:35]

Ya, siap.

198. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:36]

Baik. Jadi disahkan Bukti P-1 sampai dengan P-13. Kemudian bukti yang diserahkan 10 Desember yang P-1 sampai dengan P-17 dianggap tidak berlaku. Yang berlaku P-1 sampai dengan P-13, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [24:00]

Cukup, Majelis Yang Mulia. Terima kasih.

200. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:02]

Baik.
Sekarang Perkara Nomor 185.

201. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. ANDREAN SAEFUDIN [24:19]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

202. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:20]

Ya, ini dari pemantau, ya?

203. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. ANDREAN SAEFUDIN [24:24]

Betul, Yang Mulia.

204. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:25]

Ya, ini atas nama siapa ini yang bicara?

205. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. ANDREAN SAEFUDIN [24:29]

M. Andrean Saefudin, Yang Mulia.

206. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:31]

Baik. Silakan, sampaikan Permohonan Saudara.

207. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. ANDREAN SAEFUDIN [24:36]

Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

208. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:41]

Wassalamualaikum.

209. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. ANDREAN SAEFUDIN [24:42]

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, saya M. Andrean Saefudin (Ketua Umum Sarekat Demokrasi Indonesia), dalam hal ini mewakili Lembaga Pemantau Pemilih Sarekat Demokrasi Indonesia mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 217 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024.

Adapun untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan, Yang Mulia, mohon izin (...)

210. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:25]

Ya.

211. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. ANDREAN SAEFUDIN [25:26]

Di halaman 3 sampai dengan halaman 4.

Selanjutnya, Tenggat Waktu Permohonan. Sebagaimana di awal, bahwasanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 217 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024, dan diumumkan pada hari Minggu, tertanggal 8 Desember 2024, pukul 4 ... 16.17 WIT, dan Permohonan diajukan pada tanggal 9 Desember 2024. Sehingga, (ucapan tidak terdengar jelas) tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon me ... diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggat waktu pengajuan Permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan undang-undang dan juga PMK 3.

212. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:15]

Oke.

213. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. ANDREAN SAEFUDIN [26:16]

Kedudukan Hukum Pemohon, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 05, tanggal 15 September 2022, yang dibuat oleh Notaris, Eva Fauziah, S.H., M.Kn., tentang Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum Sarekat Demokrasi Indonesia dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor (...)

214. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:35]

Jadi, ini pemantau terakreditasi, ya?

215. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. ANDREAN SAEFUDIN [26:39]

Izin, menjelaskan, Yang Mulia. Secara administratif memang kami tidak terdaftar, tetapi kemudian kami memiliki konsentrasi terhadap isu demokratisasi di Papua, sebagaimana di 2021, kita pernah mengadvokasi di Pilkada Yalimo. Sehingga, nanti mungkin di Rapat Permusyawaratan Yang Mulia dapat dipertimbangkan.

216. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:59]

Oke. Kemudian, di Provinsi Papua Selatan, itu ada berapa pasangan calon?

217. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. ANDREAN SAEFUDIN [27:10]

4 pasangan calon, Yang Mulia.

218. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:11]

4 pasangan calon.

219. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. ANDREAN SAEFUDIN [29:12]

Nanti akan kami uraikan.

220. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:13]

Kalau ada 4 pasangan calon, apakah masih dimungkinkan adanya pemantau sebagai pihak di sini? Berdasarkan pasal berapa itu?

221. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. ANDREAN SAEFUDIN [29:25]

Secara ... secara umum, saya rasa sangat dimungkinkan, Yang Mulia. Tetapi kemudian, ada peraturan Mahkamah Konstitusi yang membatasi terkait dengan calon yang ... pemantau pemilih memiliki kewenangan ketika memang berada di kotak kosong, Yang Mulia.

222. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:40]

Lah, ya. Jadi itu, ya, ada putusan Mahkamah yang bisa ada pemantau. Satu, apabila di daerah itu calonnya hanya calon tunggal atau satu calon (...)

223. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. ANDREAN SAEFUDIN [27:54]

Betul, Yang Mulia.

224. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:55]

Terus yang kemudian, dia harus terakreditasi di mana letak dia bisa memantau, ya?

225. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. ANDREAN SAEFUDIN [28:03]

Betul, Yang Mulia.

226. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:04]

Nah, jadi dari syarat itu, Saudara ... gimana menurut Saudara LS-nya?

227. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. ANDREAN SAEFUDIN [28:11]

Menurut hemat kami, mungkin lebih pada pertimbangannya nanti, Yang Mulia.

228. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:15]

Oke, kalau memang begitu (...)

229. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. ANDREAN SAEFUDIN [28:15]

Bahwasanya (suara tidak terdengar jelas) menyampaikan pokok-pokok Permohonan (...)

230. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:18]

Ya.

231. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. ANDREAN SAEFUDIN [28:18]

Karena itu menjadi kewenangan Majelis.

232. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:20]

Ya. Nanti itu di respon KPU, ya, Bawaslu, Pihak Terkait, boleh enggak ini jadi pemantau ... tidak? Ada 4 calon kok pemantau menjadi pihak dalam perkara ini, ya?

Silakan, diteruskan!

233. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. ANDREAN SAEFUDIN [28:36]

Baik, Yang Mulia. Untuk kedudukan hukum telah dibacakan. Masuk pada pokok-pokok Permohonan, Yang Mulia.

234. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:40]

Ya.

235. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. ANDREAN SAEFUDIN [28:03]

Bahwa ... poin 18, Pokok Permohonan.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 120 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum ... Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, sebagaimana Bukti P-3 dapat diuraikan.

Tabel.

1. Nama Pasangan Calon, ada Darius Gewilom berpasangan dengan Yusak Yaluwo.
2. Pasangan Nomor 2, Dr. Ir. Apolo Safanpo dan Paskalis Imadawa.
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Romanus Mbaraka dan Albertus Muyak (...)

236. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:23]

Ya, itu dianggap dibacakan. Semua sudah tahu itu. Apa yang jadi dalil, Saudara?

237. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. ANDREAN SAEFUDIN [28:28]

Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

Untuk poin 19. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dan Wakil Gubernur ... Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024, Bukti P-2, itu sebagaimana di tabel 2, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

238. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:04]

Ya.

239. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. ANDREAN SAEFUDIN [28:04]

Nah, adapun keberatan Pemohon atas proses tahapan dan pelaksanaan Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 mendalilkan sebagai berikut, Yang Mulia.

Ini agak sedikit kontroversi memang, bahwa sebagaimana kita ketahui Provinsi Papua Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 yang terdiri dari 4 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappin, dan Kabupaten Asmat, Bukti P-4.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk pembentukan daerah provinsi, calon provinsi tersebut harus memiliki paling sedikit 5 daerah kabupaten/kota, karenanya menurut hemat Pemohon, pembentukan Provinsi Papua Selatan adalah tidak sah. Oleh karena seharusnya pemekaran provinsi berdasarkan ketentuan pasal a quo minimal terdiri 4 kabupaten/kota. P-5, Yang Mulia.

240. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:39]

Ya.

241. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. ANDREAN SAEFUDIN [30:39]

Bahwa, hemat ... menurut hemat Pemohon sedari awal dalam proses dan tahapan, serta pelaksanaan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024, telah ternyata ada banyak pelanggaran. Yang pertama, melanggar administrasi dan mencederai rasa keadilan serta prinsip kedaulatan rakyat, khususnya masyarakat Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappin, dan Kabupaten Asmat di Provinsi Papua Selatan. Mungkin diperkuat dengan keterangan dalam Perkara 1... eh, 241, Yang Mulia. Karena di objek yang sama walaupun nomor perkaranya berbeda.

Bahwa uraian di atas dimaksudkan dengan adanya pelanggaran oleh Termohon dalam proses tahapan serta pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024, telah ternyata adanya pelanggaran, baik itu administrasi, mencederai rasa keadilan, dan serta prinsip kedaulatan rakyat.

Masuk pada halaman 80, nomor 24, Yang Mulia.

Bahwa oleh karena sebagai konsekuensi logis yuridis, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apabila melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, jika dapat dibuktikan secara

sah di dalam terdapat pelanggaran Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, termasuk pada Berita Acara dan keputusan-keputusan Termohon sebagaimana objek Permohonan a quo.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan penetapan perolehan suara terhadap hasil Pilkada Serentak 2024, tidak hanya membedakan pemo ... membedah Pemohon dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah Konstitusi juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Seperti ... seperti itu, terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam pena ... penanganan Permohonan ini, baik dalam rangka pengujian undang-undang maupun sengketa Pemilu dan Pemilukada.

Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum, maka Mahkamah Konstitusi dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang dimiliki. Jika sifat itu dapat memenuhi ... mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan. Izin, Yang Mulia.

Di akhir Petitum. Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan alasan-alasan yang telah diluarkan di atas, serta bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 217 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Minggu, tertanggal 8 Desember 2024, pukul 16.07 WIT.
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 Nomor 410 Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan untuk melaksanakan pemilihan ulang di 4 kabupaten, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat di Provinsi Papua.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 4

kabupaten, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat di Provinsi Papua.

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk ... Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai keputusan lain, mohon putusannya seadil-adilnya.

Hormat kami, Tim Advokasi untuk Demokrasi dan Pilkada 2024, Sarekat Demokrasi Indonesia, M. Andrean Saefudin. Terima kasih, Yang Mulia.

242. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:35]

Baik, terima kasih. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-5?

243. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. ANDREAN SAEFUDIN [34:43]

Betul, Yang Mulia (...)

244. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:44]

Ya (...)

245. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. ANDREAN SAEFUDIN [34:45]

Tapi jika diperkenakan, nanti kita akan menambahkan bukti tambahan.

246. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:48]

Ya, silakan. Sampai besok pukul 12.00, ya.

247. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. ANDREAN SAEFUDIN [34:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

248. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:53]

Selebihnya dari waktu itu, maka tidak ... dianggap tidak ada bukti tambahan, ya.

249. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. ANDREAN SAEFUDIN [34:59]

Baik.

250. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:00]

Ya. Ini disahkan dulu P-1 sampai dengan P-5.

KETUK PALU 1X

251. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. ANDREAN SAEFUDIN [35:04]

Baik, Yang Mulia.

252. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:06]

Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

253. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025: M. ANDREAN SAEFUDIN [35:09]

Dirasa cukup, Yang Mulia.

254. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:11]

Baik, terima kasih.

Kemudian sekarang Perkara 205, Pemohonnya tidak hadir. Pemantau dari ... Pemantau Pemilihan Provinsi Papua Selatan, tidak hadir. Ya, ini Pemohonnya tidak hadir. Tapi dalam catatan kami, ada surat pencabutan bertanggal 10 Januari tahun 2025 perihal Pemberitahuan Pencabutan Berkas Permohonan atas Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, Nomor Register 205, ditandatangani oleh Ir. Saparuddin, ya. Jadi perkara ini dicabut dengan surat yang sah dan sudah diterima di Mahkamah, nanti akan dilaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim.

Kemudian berikutnya, Perkara Nomor 238 Kabupaten Merauke.

255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [36:53]

Terima kasih, Yang Mulia.

256. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:55]

Silakan.

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [36:56]

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Izinkan kami membacakan Permohonan Pemohon pada Perkara 238 terkait dengan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024, pukul 10.00 WIT.

258. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:20]

Oke.

259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [37:20]

Pemohonnya adalah Hendrikus Mahuse sebagai Calon Bupati dan H. Riduwan sebagai Calon Wakil Bupati.

260. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:31]

Oke.

261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [37:31]

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah.

262. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:33]

Kewenangan dianggap dibacakan.

263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [36:33]

Dianggap dibacakan.

264. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:36]

Tenggang waktunya gimana?

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [37:37]

Tenggang waktu terpenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

266. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:43]

Saudara mengajukan Permohonan ini kapan?

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [37:46]

Permohonan diajukan pada tanggal 7 Desember 2024.

268. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:49]

7 Desember.

269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [37:51]

Pada tanggal 10 Desember 2024, Yang Mulia.

270. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:53]

Oke, terus Perbaikannya?

271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [37:54]

Perbaikan Permohonan diajukan pada tanggal 12 Desember 2024.

272. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:59]

Oke, oke. Berarti masuk tenggang waktu, ya?

273. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [38:00]

Masih tenggang waktu, Yang Mulia.

274. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:03]

Sekarang pasangan ... Legal Standing-nya yang ajukan pasangan calon?

275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [38:07]

Pasangan calon, Yang Mulia.

276. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:08]

Nomor Urut 3?

277. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [38:09]

Nomor Urut 3.

278. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:10]

Terus ke syarat berikutnya, Pasal 158 masuk, enggak?

279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [38:17]

Terkait ambang batas, karena ... apa ... melebihi ambang batas 2%.

280. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:24]

Mestinya harus 2%. Ini berapa selisihnya? Berapa %?

281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [39:26]

Selisihnya di angka 8.391 suara, Yang Mulia.

282. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:33]

Padahal itu maksimal harus 2.292, ya?

283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [39:40]

Betul, Yang Mulia.

284. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:41]

Oke, jadi di luar ambang batas.

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [39:42]

Betul, Yang Mulia.

286. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:42]

Oke, kenapa masih tetap diajukan?

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [39:46]

Karena dari Pemohon mendalilkan bahwa terdapat pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif (...)

288. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:53]

Oke, ada TSM. TSM-nya bentuknya apa saja?

289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [39:58]

Kami kelompokkan ada beberapa, Yang Mulia.

290. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:01]

Ya.

291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [40:02]

Yaitu terkait dengan mobilisasi aparat sipil negara untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke.

292. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:09]

Sebagai contoh mobilisasinya apa itu? ASN itu?

293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [40:13]

Sebagai contoh adanya kepala distrik di ... di distrik ... apa namanya (...)

294. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:22]

Jangan tanya saya.

295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [40:23]

Kepala Distrik Muting, Yang Mulia, atas nama Jhon Mahuzet Kayame yang mengadakan Simulasi Pencoblosoan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

296. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:33]

Itu yang memobilisasi siapa? Pasangan calon?

297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [40:38]

Pasangan calon, Yang Mulia.

298. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:39]

Nomor Urut 4?

299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [40:40]

Nomor Urut 4, Yang Mulia.

300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [40:41]

Kok bisa memobilisas. Apa di yang petahana?

301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [40:45]

Izin, Yang Mulia.

302. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:48]

Ya, bagaimana?

303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [40:49]

Izin menjelaskan. Bahwa di situ ada keterlibatan kepala distrik ini.

304. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:55]

He em.

305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [40:56]

Pada saat kampanye, dia melakukan simulasi pencoblosan, Yang Mulia.

306. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:59]

Oke.

307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [40:00]

Siap.

308. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:02]

Oh, dia ada simulasi pencoblosan (...)

309. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [40:02]

Siap.

310. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:04]

Yang dipakai contoh adalah Pasangan Nomor Urut 4?

311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [40:06]

Siap, Yang Mulia.

312. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:06]

Oke.

313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [40:09]

Dan Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 4, juga hadir pada saat itu, Yang Mulia.

314. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:14]

Oke.

315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [40:15]

Bersama-sama.

316. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:15]

Terus apa lagi?

317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [40:17]

Kemudian yang kedua, Yang Mulia. Terkait dengan tidak independen dan tidak profesionalnya Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Merauke.

318. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:26]

Oh, Bawaslu Kabupaten Merauke tidak independen?

319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [40:28]

Tidak independen, Yang Mulia.

320. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:30]

Nanti direspons, ya, Bawaslu, ya. Bawaslu Merauke. Ini dinyatakan dituduh tidak independen. Kenapa kalau tidak independen menurut Pemohon?

321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [40:41]

Izin menjelaskan, Yang Mulia.

322. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:43]

Ya.

323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [40:44]

Tidak independennya di sini bahwa dari peristiwa yang tadi.

324. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:48]

Ya.

325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [40:49]

Mengenai (...)

326. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:50]

Adanya (...)

327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [40:51]

Adanya keterlibatan kepala (...)

328. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:51]

ASN itu?

329. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [40:54]

Distrik, ASN itu.

330. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:55]

He eh.

331. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [40:56]

Bawaslu Kabupaten Merauke hanya merekomendasikan ke BKN dalam hal ini hanya pelanggaran disiplinnya saja, disiplin.

332. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:03]

Oke, itu dianggap tidak anu, ya?

333. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [41:06]

Padahal kita tahu bersama bahwa di sini ada pelanggaran terhadap Pasal 188 dan 189 Undang-Undang Pilkada.

334. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:17]

Ya.

335. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [41:17]

Yang mana, ketika kalau ini diteta di ... diterapkan, maka Pasangan Calon 04 tidak mungkin bisa melakukan kampanye.

336. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:26]

Oke.

337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [41:26]

Karena maksimal kurungan ... sanksi pidananya itu 6 bulan penjara.

338. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:31]

Ya.

339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [41:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

340. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:33]

Terima kasih. Terus apa lagi?

341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [41:35]

Berikutnya, Yang Mulia. Terkait dengan praktik bagi-bagi uang atau money politics.

342. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:35]

Nah, money politics.

343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [41:40]

Betul, Yang Mulia.

344. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:42]

Siapa yang bagi?

345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [41:44]

Dalam ... apa ... Permohonan kami, yaitu Saudari Priscillia.

346. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:51]

Ya.

347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [41:51]

Dan itu juga terkait dengan (...)

348. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:53]

Saudari Priscillia itu siapa?

349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [41:55]

Itu tim dari (...)

350. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:56]

Tim dari Pemenangan Pasangan Nomor Urut 04?

351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [42:00]

Betul, Yang Mulia.

352. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:02]

Oke. Apakah dia memang sebagai pasangan ... apa namanya ... pemenangan, tim pemenangan? Itu kan ada daftar yang masuk sebagai tim pemenangan, dia masuk daftar itu enggak?

353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [42:18]

Izin, Yang Mulia. Dia ini calon anggota legislatif di tahun 2000 (...)

354. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:26]

Oh, oke.

355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [42:27]

Ya, yang mana dari Partai NasDem, yang mana kita tahu bersama bahwa Partai NasDem adalah partai pengusung daripada pasangan calon (...)

356. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:27]

Nomor Urut 4.

357. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [42:28]

Nomor Urut 4.

358. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:39]

Nominal yang dibagikan berapa?

359. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [42:41]

Izin (...)

360. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:41]

Pakai amplop, pakai apa?

361. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [42:45]

Izin, Yang Mulia. Jadi, ini berdasarkan saksi yang akan kita ajukan nanti, Yang Mulia. Karena saksi ini dia yang mengalami langsung, mendengar langsung, melihat.

362. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:56]

Sementara, buktinya sebelum ada saksi ada bukti?

363. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [42:59]

Ada bukti video, Yang Mulia.

364. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:01]

Bukti video.

365. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [43:01]

Sudah kami ajukan dari pertama.

366. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:03]

Itu din ... dino ... diberi nomor kode berapa, P berapa, videonya?
Enggak hafal?

367. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [43:16]

Izin, Yang Mulia.

368. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:23]

Ya. P berapa?

369. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [43:34]

Izin, Yang Mulia. P-9, Yang Mulia.

370. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:35]

P-9. Nominalnya berapa uang money politics, itu?

371. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [43:41]

Izin, Yang Mulia. Ini sekalian dengan dalil kita mengenai mobilisasi C.Pemberitahuan, KWK.

372. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:49]

Oke.

373. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [43:51]

Artinya di sini Saudari Priscillia ini, dia memobilisasi, ya. Ada sekitar 1.500 C.Pemberitahuan.

374. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:00]

Di C.Pemberitahuan ... C itu ... Formulir C-6 toh, berarti?

375. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [44:05]

Ya, Formulir C-6.

376. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:07]

Ya, diapakan itu?

377. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [44:07]

Itu dibagikan ke beberapa orang, ada sekitar 50 orang, termasuk saksi (...)

378. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:12]

Tapi sebetulnya ... tapi sebetulnya bukan pemilih?

379. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [44:15]

Bukan, Yang Mulia. Jadi, mereka memilih berdasarkan itu (...)

380. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:20]

Ya.

381. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [44:20]

Yang mana dari hasil setelah mereka melakukan pencoblasan dengan C.Pemberitahuan milik orang lain itu, mereka diberikan upah per lembar Rp100.000,00, Yang Mulia.

382. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:28]

Oke. Jadi, dia mobilisasi 1.500-an (...)

383. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [44:32]

Siap.

384. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:32]

Dia kemudian nyoblos, baru dikasih uangnya?

385. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [44:35]

Siap, Yang Mulia.

386. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:36]

Suruh nyoblos nomor urut berapa? 4, pengakuannya?

387. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [44:40]

Suruh nyoblos Nomor Urut 4, Yang Mulia.

388. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:41]

Oke. Ada lagi?

389. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [44:48]

Hal ini juga kita sudah laporkan ke Bawaslu.

390. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:48]

Terus, laporannya gimana?

391. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [44:49]

Sampai dengan lapo ... Permohonan yang kita maju ... ajukan, Yang Mulia, itu belum ada tangga ... apa ... penye ... ya (...)

392. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:59]

Belum ada tanggapan dari Bawaslu?

393. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [44:49]

Belum ada ... ya, belum ada tanggapan dari Bawaslu.

394. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:01]

Nanti Bawaslu, ya, gimana ini?
Terus, apa lagi? Yang terakhir, Anda mengatakan bahwa KPU lalai, tidak melaksanakan kewenangannya dengan baik, gitu?

395. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [45:14]

Siap, Yang Mulia. Izin, dalam hal ini jajaran atau ... apa ... penyelenggara Pemilu, dalam hal ini adalah KPPS. Cuma (...)

396. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:24]

Oh, yang di tingkat TPS, toh, ini?

397. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [45:25]

Siap.

398. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:26]

Oke.

399. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [45:26]

Dimana, Yang Mulia, kita tahu bersama bahwa kalau pemilih masuk untuk melakukan pemilihan atau me ... menggunakan hak pilihnya, maka dia membawa Formulir C.Pemberitahuan itu dan memberikan KTP.

400. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:41]

Ya.

401. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [45:41]

Artinya, untuk diverifikasi oleh KPPS 4 ... anggota KPPS 4.

402. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:46]

Ya.

403. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [45:46]

Mencocokkan itu.

404. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:48]

Ya.

405. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [45:48]

Tertapi ... tetapi yang terjadi di ... di TPS, ada 9 distrik yang kami dapat.

406. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:54]

Ya, 9 distrik.

407. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [45:54]

Ya, ada pernyataannya, Yang Mulia, sudah kami ajukan di alat bukti juga.

408. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:59]

Jadi, tidak melalui prosedur itu?

409. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [46:00]

Tidak meminta KTP untuk diverifikasi, bahkan dibiarkan.

410. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:03]

Oke.

411. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [46:04]

Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa ini memuluskan apa yang dibuat oleh Saudari Priscilla.

412. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:09]

Oke. Patut diduga itu, ya?

413. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [46:11]

Demikian, Yang Mulia.

414. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:13]

Baik. Terus, apa lagi? Masih ada? Calon Bupati Fauzan itu, gimana, nomor urut ... membagikan pompa air (...)

415. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [46:23]

Siap, Yang Mulia.

416. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:23]

Di masa tenang?

417. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [46:25]

Ya, Yang Mulia. Itu di tanggal 25 November, di salah satu WA group. WA group, itu di WA group Perumahan Lampu Satu Indah. Bahwa ada seseorang me-posting dirinya, ya, dan mengatakan bahwa (...)

418. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:43]

Ini bantuan dari Paslon Nomor Urut 4?

419. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [46:44]

Bantuan ... ya.

420. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:44]

Oke.

421. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [46:44]

Dari Ibu Fauzan Nihayah.

422. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:51]

Oke. Ada buktinya itu?

423. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [46:52]

Ada, Yang Mulia, ada (...)

424. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:53]

P berapa? Nanti Pihak Terkait, ya, merespons ini. Jadi, wakil bupati dituduh membagikan pompa air di masa tenang untuk pemenangan Pasangan Nomor 4, ya. P berapa? Bisa cepat ... agak cepat.

425. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [47:15]

Di P-21, Yang Mulia.

426. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:16]

P-21. Sudah P-21, lengkap ini namanya.

427. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [47:17]

Siap, Yang Mulia.

428. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:19]

Ya, kan? Terus terakhir, dalil Saudara (...)

429. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [47:27]

Dalil yang (...)

430. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:29]

Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merauke untuk PSU di TPS 1, TPS 2 Distrik Padua, Kampung Wayau, tidak dilaksanakan oleh Termohon, betul?

431. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [47:39]

Siap, betul, Yang Mulia.

432. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:39]

Oke. Ini nanti, Bawaslu, benar enggak ini? Tapi kenapa ... KPU juga, kenapa tidak melaksanakan ini? Nanti dijelaskan, ya.

Baik. Terakhir, Petitumnya. Silakan.

433. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [47:49]

Oke. Baik, Yang Mulia.

Untuk Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan.
 - a. Keputusan KPU Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024, pukul 10.00 WIT.
Atau.
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, pukul 10.00 WIT sepanjang mengenai perolehan suara di Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Kurik, Distrik Malind, Distrik Jagebob, Distrik Muting, Distrik Ulilin, dan Distrik Elikobel.
Atau.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut. Yang tabelnya dianggap dibacakan.
Atau.

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk membatalkan dan/atau mendiskualifikasi pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 4 Yoseph B. Gebze, S.H., LL.M., dan Fauzun Nihayah, S.H.I., M.H.
Atau.
5. Memerintahkan kepada Termohon.
 - a. Termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Distrik Merauke.
 - b. Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Semangga.
 - c. Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Tanah Miring.
 - d. Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Malind.
 - e. Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Jagebob.
 - f. Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Muting.
 - g. Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Ulilin.
 - h. Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Elikobel.

Atau memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikian, Yang Mulia. Hormat kami.

434. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:11]

Baik, terima kasih.
Yang Mulia Prof. Enny, ada? Silakan, Prof.

435. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [48:16]

Baik. Saudara Kuasa Pemohon, terkait dengan dalil Saudara mengenai mobilisasi ASN itu sudah dilaporkan belum?

436. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [48:27]

Izin, Yang Mulia. Untuk peristiwa itu sudah kita laporkan, tetapi pada saat kami melaporkan itu sudah menjadi temuannya Bawaslu.

437. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [48:33]

Sudah jadi temuan?

438. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [48:35]

Temuan Bawaslu Nomor 001.

439. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [48:38]

Ya, kemudian apa tindakan lanjut dari temuan itu?
Sudah punya (...)

440. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [48:43]

Temuan itu yang tadi saya sampaikan, Yang Mulia. Bahwa merekomendasikan ke BKN, hanya sebatas pelanggaran disiplin ASN-nya.

441. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [48:52]

Oke. Kemudian ini kan menyangkut salah satu ASN yang melakukan simulasi, selama ini nanti tolong dari KPU, ya, bisa di lebih dijelaskan lagi, boleh enggak, gitu lho, dilakukan simulasi oleh ASN berkenaan dengan soal pencoblosan itu di luar tugas tanggung jawab dari KPU. Tolong nanti bisa dijelaskan soal ini, ya.

Kemudian ini dilakukan di TPS ... di distrik mana? Distrik Muting saja?

442. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [49:20]

Dia Kepala Distrik Muting, tapi dilakukannya di Distrik Merauke, Yang Mulia.

443. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:23]

Berapa perolehan suara di Distrik Muting itu?

444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [49:27]

Izin, Yang Mulia, lihat dulu, ya.

445. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:36]

Ada buktinya sudah di Distrik Muting berapa perolehannya? Masih dicari?

Yang menang siapa itu? Paslon di situ. Dicatat, ya, itu, yang soal itu, yang pertanyaan saya! Kemudian berikutnya, terkait dengan dalil Saudara, yakni dalil 3, 4, 5, yang menyangkut soal yang sudah Saudara sebutkan Priscillia Tania Kalinka tadi, ya?

446. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [52:23]

Siap.

447. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:23]

Itu, yang dia melakukan hal itu, ada di distrik mana saja, itu?

448. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [52:29]

Di Distrik Merauke, Yang Mulia.

449. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:31]

Hanya Distrik Merauke saja?

450. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [52:33]

Siap.

451. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:33]

Berapa TPS Distrik Merauke?

452. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [52:35]

Di T ... di Distrik Merauke ada 153 TPS, Yang Mulia.

453. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:38]

153 TPS. Itu dilakukan semua oleh Priscillia atau hanya di TPS tertentu?

454. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [52:45]

Artinya itu untuk ... ininya, penyebarannya, seluruh (...)

455. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:50]

Ya.

456. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [52:50]

Seluruh (...)

457. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:50]

Seluruh TPS, itu (...)

458. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [52:51]

Penyebarannya.

459. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:52]

Yang Saudara dalilkan, seluruh TPS?

460. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [52:53]

Siap.

461. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:53]

Perolehan suaranya berapa, di situ? Pertanyaan saya ini ... maksudnya adalah Saudara Kuasa Pemohon (...)

462. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [53:07]

Siap.

463. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [53:07]

Karena Saudara kan meminta, ya, dalam Petitumnya ini adalah untuk menolak Paslon Nomor 4. Ini kan harus kita lihat nanti kaitannya 45.159 suara yang Saudara nalkan, diminta untuk dinolkan itu. Itu kalau dikaitkan dengan suara-suara yang diperoleh di TPS itu, berapa banyak suara yang diperoleh di situ? Itu kalau bisa dijelaskan, ada buktinya, bisa kita lihat nanti buktinya, ya. Berapa ininya ... perolehan suara di TPS tersebut yang tadi Saudara didalilkan, Saudara Priscillia membagi-bagikan uang itu, ya.

464. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [53:42]

Kalau untuk di Distrik Merauke sendiri, Yang Mulia. Ini ada 18.600, Yang Mulia. Untuk total suara, untuk Paslon Nomor 4.

465. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [53:50]

Total suaranya?

466. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [53:51]

Ya.

467. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [53:52]

Itu di TPS mananya? Langsung di Merauke saja, itu?

468. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [53:56]

Di Distrik (...)

469. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [53:56]

Satu distrik saja (...)

470. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [53:56]

Merauke saja.

471. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:57]

Distrik Merauke.

472. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [53:58]

Siap, Yang Mulia.

473. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [53:59]

Tidak ada rincian di TPS-nya yang tadi, 100 TPS itu, ya?

474. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [54:03]

Masalahnya penyebarannya ... kalau menurut kesaksian dari ... nanti saksi yang akan kita ajukan. Bahwa itu ada sekitar 50 orang dikasih berdasarkan raut wajah (...)

475. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:12]

Ini (...)

476. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [54:12]

Muka.

477. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:13]

Ini menggunakan noken atau bukan?

478. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [54:15]

Bukan, Yang Mulia.

479. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:15]

Bukan, ya.

480. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [54:16]

Ya.

481. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:16]

Sudah bukan noken lagi, ya?

482. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [54:17]

Ya.

483. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:18]

Ya. Terus Saudara bisa ... kemudian menunjukkan buktinya, 45.159 suara yang minta dinolkan, itu? Dari suara-suara yang Saudara tadi tunjukkan bahwa ini ada di Merauke, kemudian ada di Muting, ya. Dari yang Saudara dalilkan, itu. Ada buktinya? Bukti tambahannya di situ?

484. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [54:42]

Ada di bukti tambahan, Yang Mulia.

485. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:43]

Sudah (...)

486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [54:43]

Akan kami masukkan.

487. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:43]

Melampirkan bukti tambahannya?

488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [54:44]

Siap, Yang Mulia.

489. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:46]

Ya. Itu saja yang saya minta, terima kasih.

490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [54:48]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

491. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-25. Kemudian Bukti Tambahannya P-26 sampai dengan P-47?

492. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [54:02]

Betul, Yang Mulia.

493. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:02]

Betul, tapi ada catatan ini. Untuk P-7, P-9, dan P-23 itu tersimpan dalam satu flash disk dengan satu leges. Ini mestinya harus dipisah tiga leges, ya, nanti (...)

494. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [54:18]

Baik, Yang Mulia.

495. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:18]

Diurus, ya.

496. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [54:19]

Siap, Yang Mulia.

497. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:20]

Jadi diurus. Ini jangan ngirit, gitu. Rp 30.000,00 saja kok ngirit, ya.

Kemudian KTA berdasarkan ... apa ... catatan, ada yang habis masa berlakunya 31 Desember nanti diperbarui. Atas nama (...)

498. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [55:37]

Sudah diperbarui dan sudah kami ajukan, Yang Mulia.

499. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:40]

Sudah diajukan.

500. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [55:41]

Sudah dimasukkan.

501. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:41]

Pak Nasrullah, Pak Denny, dan Pak Salman Darwis, Pak Mulia, ya?

502. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [55:46]

Siap.

503. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:46]

Sudah semua ini?

504. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [55:48]

Sudah diajukan.

505. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:48]

Benar, ya?

506. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [55:50]

Yang dua, Yang Mulia. Atas nama (...)

507. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:51]

Oh. Ya, itu.

508. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [55:52]

Pak Nasrullah dan pak ... dengan saya sendiri, Stefanus, sudah kami ajukan yang terbaru, Yang Mulia.

509. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:58]

Oke. Nanti yang belum di ... anu , ya ... diperbaiki, ya.

510. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [56:01]

Baik, Yang Mulia.

511. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:01]

Supaya tidak jadi advokat bodong. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

512. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [56:09]

Cukup, Yang Mulia.

513. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:10]

Baik, terima kasih, ya.
Sekarang perkara yang kelima di sore ... sesi sore ini, Perkara 231 Kabupaten Tambrauw.

514. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [56:33]

Siap, Yang Mulia.

515. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:33]

Ini dokumennya tebal-tebal ini.

516. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [56:38]

Ya, Yang Mulia.

517. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:39]

Seperti Kuasa Hukumnya.

518. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [56:43]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

519. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANS DANIEL WATTIMENA [56:46]

Izin, Yang Mulia. Pihak Terkait, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Yang Mulia.

520. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:49]

Kenapa?

521. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANS DANIEL WATTIMENA [56:50]

Perkara 231.

522. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:52]

He eh, Kenapa?

523. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANS DANIEL WATTIMENA [56:53]

Kami mau konfirmasi saja, Yang Mulia.

524. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:55]

Ya.

525. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANS DANIEL WATTIMENA [56:56]

Di dalam Web MK itu ada dua yang teregister. Yang pertama, Permohonan tanggal 10. Kemudian yang kedua itu perkara yang teregister, Perbaikan Permohonan tanggal 13 Desember, Yang Mulia.

526. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:10]

Ya, nanti kita cek sambil kita tanya ini, ya.

527. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANS DANIEL WATTIMENA [57:12]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

528. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:14]

Nanti.
Ya, silakan.

529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [57:16]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

530. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:19]

Walaikumsalam.

531. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [57:22]

Ter ... perba ... Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Penetapan ... Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada tanggal 6 Desember 2024.

532. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:41]

Oke. Anda mengajukan Permohonan yang pertama kapan itu?

533. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [57:44]

Kami mengajukan Permohonan pada tanggal 10 Desember.

534. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:47]

10 Desember.

535. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [57:48]

Pukul 22.00.

536. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:50]

Pukul 22.00?

537. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [57:52]

Ya, Yang Mulia.

538. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:53]

20.52 atau 22.00?

539. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [57:55]

22.00.

540. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:57]

Diajukan secara luring oleh Pemohon pada hari Selasa, tanggal 10 Desember (...)

541. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [58:02]

Ya.

542. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:03]

Betul?

543. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [58:03]

Ya, benar, Yang Mulia.

544. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:04]

Tercatat di sini 20.52. Yang betul yang mana, menurut Saudara?

545. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [58:08]

20 ... oh, ya, maaf, Yang Mulia.

546. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:11]

Ha?

547. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [58:11]

20.52.

548. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:12]

20.52?

549. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [58:14]

Ya, mohon maaf, Yang Mulia.

550. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:16]

Jangan ... jangan grogi (...)

551. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [58:17]

Ya.

552. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:17]

Gitu, ya, kan?

553. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [58:19]

Soalnya belum apa-apa di interupsi, Yang Mulia. Jadi grogi sedikit.

554. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:22]

Waduh, jangan grogi. Saya hanya melatih supaya tidak grogi. Untuk (...)

555. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [58:28]

Terus, kemudian (...)

556. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:28]

Kepentingan 2029 supaya lebih mantap.

557. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [58:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

558. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:31]

Sehingga dapat borongan banyak.

559. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [58:34]

Amin, Yang Mulia.

560. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:37]

Baik. Terus perbaikannya kapan (...)

561. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [58:38]

Perbaiki tanggal 13 Desember, Yang Mulia.

562. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:40]

13 Desember.

563. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [58:41]

Ya.

564. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:42]

Nah, ini yang dipakai yang mana? Yang Perbaikan atau yang Permohonan awal?

565. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [58:47]

Kan itu tidak signifikan, Yang Mulia. Hanya perbaikan saja.

566. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:52]

Oh, yang diperbaiki yang mana?

567. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [58:53]

Perbaikan yang diperbaiki cuma data dari jumlah DPT.

568. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:59]

Oh.

569. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [59:00]

DPT (...)

570. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:00]

Itu, ya.

571. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [59:01]

DPT yang kami permasalahan. Jadi (...)

572. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:02]

Jadi dua-duanya dipakai itu?

573. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [59:06]

Ya, kan hanya perbaikan toh, Yang Mulia. Kan biasa (...)

574. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:08]

Kalau biasanya perbaikan itu, ya. Perbaikan seluruhnya. Mulai dari awal sampai ke Petitum.

575. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [59:13]

Ya.

576. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:15]

Itu, gimana?

577. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [59:17]

Ini cuma perbaik ... jadi kan pada saat yang kami ajukan tanggal 10 Desember itu.

578. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:21]

He eh.

579. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [59:22]

Contoh jumlah DPT yang bermasalah itu baru sekitar 832.

580. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:28]

Ya, sekarang berarti (...)

581. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [59:30]

Nah (...)

582. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:30]

Mulai yang tanggal 13 itu (...)

583. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [59:30]

Kemudian pada tanggal 13 Desember, itu kami bisa mendapatkan sekitar 1.186 DPT yang kami permasalahan.

584. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:39]

Nah, itu yang diperbaiki itu.

585. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [59:41]

Ya.

586. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:41]

Mulai dari perihal sampai di belakang (...)

587. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [59:43]

Yang lainnya sama semua, Yang Mulia, tidak ada perubahan.

588. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:47]

Oh, tidak ada?

589. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [59:48]

Ya.

590. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:48]

Berarti yang dipakai kalau gitu yang terbaru?

591. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [59:50]

Ya, Yang Mulia.

592. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:51]

Oke, ini yang terbaru, yang 13, ya. Nah, ini untuk ... lah, ini perbaikannya parsial, jadi mestinya kalau perbaikan itu mulai dari Perihal sampai ke Petitemnya.

593. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:00:11]

Kami kemudian juga kum ... ininya ... kasihnya seperti ini juga, Yang Mulia. Semua lengkap, softcopy-nya juga yang sama ... kami sampaikan lengkap, Yang Mulia (...)

594. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:24]

Coba ini di, sebentar (...)

595. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:00:24]

Dari Perihal sampai Petitemnya.

596. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:27]

Lengkap, perbaikannya lengkap kan?

597. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:00:30]

Lengkap, Yang Mulia.

598. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:31]

Ya, sudah, ya, kalau lengkap (...)

599. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:00:32]

Tidak sa ... bu ... bukan ha ... cuma halaman tentu tidak.

600. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:35]

Tidak, ya?

601. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:00:36]

Tidak.

602. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:37]

Jadi, ini (...)

603. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:00:38]

Softcopy-nya juga lengkap, Yang Mulia.

604. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:39]

Ya, sebentar, ini Permohonan awal 3 Januari ... anu ... ya, ini, terus kemudian ini perbaikannya ini, ya?

605. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:00:59]

Kan ... Yang Mulia, kan memang kita dikasih waktu untuk boleh perbaikan, toh, Yang Mulia (...)

606. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:04]

Lha, ya.

607. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:01:04]

Ya, ya, kita memanfaatkan waktu itu untuk perbaikan, Yang Mulia.

608. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:07]

Jadi ini ... ini Permohonan awal (...)

609. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:01:09]

Ya.

610. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:10]

Terus ini ada lebih tebal Perbaikan Permohonan (...)

611. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:01:11]

Perbaiki ... ya, ya, Yang Mulia. Hanya karena jumlah contoh DPT yang kami permasalahan pada tanggal ... yang tanggal 10, itu kami baru dapat sekitar 800-an, kemudian (...)

612. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:22]

Ya, ya, berarti kalau begitu, karena semuanya sudah lengkap di Perbaikan yang dipakai adalah Perbaikannya.

613. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:01:30]

Ya, Yang Mulia.

614. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:31]

Kan, gitu aja (...)

615. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:01:32]

Ya, Yang Mulia.

616. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:32]

Jadi yang dipakai perbaikan, ya, itu.

617. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:01:38]

Lanjut, Yang Mulia.

618. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:39]

Ya, silakan.

619. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:01:41]

Yang Mulia. Kami memang me ... melebihi ambang batas tidak memenuhi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

620. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:50]

Ya, he em.

621. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:01:51]

Akan tetapi, Yang Mulia. Kami mohon Pasal 158 itu untuk dikesampingkan, karena permasalahan ini sama persis dengan permasalahan yang pernah diputus oleh Mahkamah, yaitu Putusan Makamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI (...)

622. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:04]

Ya, dianggap dibacakan, ya, dianggap dibacakan, itu.

623. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:02:11]

Oke, dianggap dibacakan. Terima kasih, Yang Mulia.

624. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:13]

Ya, terus, TSM-nya yang mana? Dalil-dalil Saudara, apa yang anu dipersoalkan?

625. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:02:20]

Jadi, Yang Mulia. Kami ini memang mempermasalahkan lah mengenai DPT. Jadi, dalam penetapan DPT ini, Yang Mulia (...)

626. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:28]

He em.

627. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:02:29]

Pada saat penetapan DPT itu tidak ditandatangani lima komisioner KPU.

628. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:36]

Oh, dalam penetapan DPT tidak ditandatangani komisioner?

629. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:02:38]

Tidak ditandatangani, tidak. Hanya ditandatangani oleh ketua dan dua komisioner KPU, itu kami sampaikan pada Bukti P-6.

630. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:59]

Ini kit ... setelah kita cermati, ternyata Perbaikan Permohonannya itu melewati tenggang waktu (...)

631. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:03:10]

Tidak, Yang Mulia.

632. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:11]

Ha? Sebentar.

633. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:03:12]

Kan, tanggal tiga ... te ... tanggal ini, Yang Mulia, masih 3 hari, kan?

634. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:17]

13 Desember (...)

635. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:03:23]

19.28.

636. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:24]

13 Desember 2024, Pukul 19.05.

637. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:03:30]

Ya, kan pe ... penetapannya pukul ... masih dalam tenggang waktu, Yang Mulia. 3 hari kerja.

638. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:45]

Ya, itu Perbaikannya yang lewat itu, jadi kalau Perbaikannya lewat berarti yang dipakai adalah (...)

639. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:03:51]

Yang pertama, Yang Mulia.

640. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:52]

Yang pertama.

641. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:03:53]

Ya, Yang Mulia.

642. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:54]

Itu Kuasa Hukumnya ke anu ... Pihak Terkait, tadi yang menanyakan, ya? Yang dipakai yang mana, ya?

643. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:03:59]

Ya. Oke, Yang Mulia.

644. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:00]

Jangan keluar dulu, sebentar. Di anu ... kalau anu ... di pojok situ dulu saja.

645. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:04:08]

Baik, Yang Mulia.

646. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:09]

Ya, ini ... jadi, ini setelah kita amati, betul, yang masuk tenggang waktu itu Permohonan awal. Perbaikannya sudah lewat tenggang waktu karena lebih dari 3 hari, ya.

647. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:04:22]

Baik, Yang Mulia.

648. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:22]

Jadi, nanti yang harus direspons adalah Permohonan awal.

649. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:04:26]

Yang awal, oke.

650. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:26]

Ya, gitu, ya. Oke.

651. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:04:28]

Baik, Yang Mulia.

652. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:29]

Ya, sudah klir sekarang.
Terus (...)

653. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:04:32]

Boleh lanjut, Yang Mulia?

654. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:33]

Silakan. Yang TSM-nya, apa?

655. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:04:36]

Jadi, Yang Mulia, kami sampaikan ulang kembali. Bahwa dalam penetapan DPT itu tidak ditandatangani oleh 5 (...)

656. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:43]

5 komisioner.

657. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:04:44]

Komisioner KPU. Hanya ditandatangani oleh sal ... ketua dan 2 komisioner KPU. Itu kami sampaikan pada Bukti P-6.

658. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:51]

Oke, P-6.

659. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:04:52]

Itu yang permasalahan yang pertama.

660. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:54]

Ya.

661. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:04:54]

Yang kedua. DPT pada Kabupaten Tambrauw, pada saat Pileg dan Pilpres, itu jumlahnya 2.000 ... 2.000 ... dua rib ... 20.000 ... 21.792 ... 21.792 pemilih.

662. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:13]

Jadi, ada perbedaan antara (...)

663. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:05:15]

Kemudian, pada saat Pilkada, Yang Mulia (...)

664. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:18]

Ya.

665. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:05:18]

Hanya selisih beberapa ha ... bulan, itu DPT menjadi 22.766 (...)

666. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:26]

Oh, ada lonjakan (...)

667. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:05:28]

Ada lonjakan sebanyak sembilan ribu tujuh ... eh, 974 DPT, Yang Mulia.

668. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:32]

974. Oke.

669. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:05:34]

Kemudian, berdasarkan data dari BPS, Yang Mulia. Pada tahun 2024, usia yang berumur 15 tahun sampai dengan 59 tahun, artinya yang mempunyai ... bisa mempunyai hak pilih itu hanya 20.525 jiwa.

670. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:54]

Oh, 5 orang kalau ini, kok jiwa.

671. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:05:56]

Ya, orang, Yang Mulia.

672. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:57]

Nah, kalau jiwa, jiwanya enggak bisa milih.

673. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:06:02]

Seperti itu, Yang Mulia.

674. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:03]

Ya.

675. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:06:03]

Jadi, DPT ini melebihi dari jumlah penduduk, Yang Mulia.

676. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:08]

Oke.

677. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:06:09]

Kemudian, beb ... beberapa permasalahan, Yang Mulia, yang dari DPT yang sudah kami rangkum, yang kami temukan, itu adalah ada bebe ... modus-modus yang dilakukan oleh penyelenggara ter ... terutama pe ... Termohon, itu adalah seperti ... seperti ini, Yang Mulia. Ada di dalam satu DPT, seseorang itu tertulis namanya 2 atau 3 kali. Dia dengan menggunakan penulisan ejaan yang berbeda. Katakanlah, misalnya seperti Thomas, h ... T-O-M-A-S sama T-H-O-M-A-S. Kemu (...)

678. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:44]

Tapi itu NIK-nya, Nomor Induk Kepe ... anunya (...)

679. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:06:47]

NIK semuanya sama.

680. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:48]

Sama?

681. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:06:49]

Sama.

682. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:49]

Oh, itu di beberapa TPS (...)

683. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:06:51]

Sama, Yang (...)

684. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:51]

TPS berapa saja itu?

685. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:06:52]

Banyak, Yang Mulia. Semua sudah kami sampaikan di dalam Permohonan.

686. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:55]

Oke.

687. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:06:56]

Kami sama ur ... sama, kami uraikan yang 800 itu.

688. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:59]

Jadi ada ... tapi orang ini, akhirnya menggunakan hak pilihnya, enggak?

689. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:07:05]

Yang jelas di dalam ... semua ... hampir semua TPS itu, itu full digunakan, Yang Mulia.

690. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:11]

Oke. Jadi, berarti namanya yang dup ... ada duplikasi nama (...)

691. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:07:17]

Ya, itu (...)

692. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:17]

Tapi sebetulnya itu hanya 1 nama (...)

693. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:07:19]

1 orang.

694. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:20]

Tapi NIK-nya sama, tapi (...)

695. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:07:22]

Tanggal lahir, dan lain-lain, semua sama.

696. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:23]

Semua sama.

697. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:07:24]

Ya.

698. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:24]

Tapi dia juga menggunakan hak pilih? Dicoblos semua?

699. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:07:27]

Yang jelas di dalam semua TPS di Kabupaten Tambrauw itu, full digunakan (...)

700. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:33]

Oke.

701. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:07:34]

Gitu, perolehan suaranya.

702. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:35]

Ada buktinya, ya?

703. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:07:37]

Ada, Yang Mulia.

704. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:38]

Ya.

705. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:07:38]

Semua sudah kami sampaikan.

706. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:39]

Baik.

707. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:07:40]

Terus, ada juga yang dia dibedakan dengan jenis kelaminnya. Ada yang dibedakan alamatnya, tetapi itu namanya adalah sama. Itu kami bisa sampaikan nanti, ada kepala suku besar yang bisa menyampaikan hal ... masalah seperti ini mengenai bahwa memang adanya penggandaan-penggandaan di dalam distrik-distrik tersebut.

708. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:01]

Oke. Sehingga (...)

709. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:08:02]

Sampai keseluruhan.

710. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:03]

Sehingga DPT-nya melonjak itu?

711. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:08:03]

Melonjak, Yang Mulia.

712. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:06]

Oke, terus?

713. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:08:07]

Terus kemudian ada suatu keanehan lagi, Yang Mulia.
Di da ... Di dis ... di Desa Banfot, Distrik Fef.

714. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:15]

Ya.

715. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:08:15]

Itu diadakan PSU, Yang Mulia. Di situ, dinyatakan eh ... pe (...)

716. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:21]

Kok, bisa diadakan PSU? Siapa yang memerintahkan PSU, ini?

717. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:08:24]

Memang dari Bawaslu.

718. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:25]

Oh.

719. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:08:26]

Memang.

720. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:26]

Oh.

721. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:08:26]

Ya.

722. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:26]

Ada perintah Bawaslu?

723. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:08:27]

Ya. Cuma keanehannya seperti ini, Yang Mulia.

Begitu diadakan PSU, ternyata di desa itu yang mempunyai KTP, di desa itu hanya 7 orang. Sehingga pada PSU, hanya suara yang digunakan 7.

Jadi suara ... total keseluruhan suara setelah PSU, itu hanya 7 suara.

724. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:49]

Oke. Mestinya berapa di situ DPT-nya?

725. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:08:51]

79, Yang Mulia.

726. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:54]

79 setelah di PSU (...)

727. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:08:57]

7 (...)

728. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:57]

Yang nyoblos hanya 7?

729. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:08:58]

Ya, karena yang mempunyai e-KTP hanya 7 orang.

730. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:01]

Oke.

731. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:09:01]

Ini salah satu contoh adanya ketidakberesan terhadap DPT-DPT tersebut.

732. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:07]

Oke.

733. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:09:07]

Terus kemudian, di dalam eh ... di Desa Banfot juga, di Distrik Fef itu, kami juga sudah sampaikan di dalam Permohonan kami, dianggap dibacakan.

Bahwa adanya penggandaan dan orang yang sudah meninggal pun juga dimasukkan, itu sudah ada di dalam Permohonan, Yang Mulia.

734. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:26]

Ya.

735. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:09:26]

Dianggap dibacakan, karena agak lumayan banyak.

736. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:28]

Ya. Terus apa lagi dalilnya?

737. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:09:33]

Kemudian, Yang Mulia.

Ada juga di dalam ... dis ... izin, Yang Mulia, ya. Di Distrik Bamusbama, itu dalam waktu rekapitulasi suara di distrik, Yang Mulia. Itu tidak menggunakan standar KPU, tidak menggunakan D.Hasil yang ada hologramnya, tetapi menggunakan kertas manila.

738. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:02]

Oh, pada waktu rekap?

739. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:10:03]

Pada waktu rekap itu menggunakan (...)

740. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:05]

Oh.

741. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:10:05]

Kertas manila.

742. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:06]

Oh, jadi tidak sebagaimana (...)

743. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:10:07]

Itu fotonya kami lampirkan di dalam Permohonan, Yang Mulia.

744. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:10]

Oke, baik. Jadi, dari TPS di rekap di tingkat distrik, tapi di tingkat distrik tidak menggunakan alat sebagai ... atau fasilitas sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang.

745. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:10:24]

Ya, Yang Mulia.

746. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:25]

Tapi dia menulis di kertas manila?

747. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:10:28]

Kertas manila, Yang Mulia.

748. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:29]

Oke, terus? Nanti dijawab itu KPU.

749. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:10:33]

Terus, kemudian ada juga tugas dan fungsi PPD itu diambil alih oleh anggota KPU. Bukan komisioner, tapi mungkin pegawai atau staf di KPU, yaitu untuk pada saat pe ... untuk pe-upload-an di sistem. Jadi, diambil alih, PPD-nya disuruh menyingkir, tidak boleh meng ... tidak boleh terlibat, diambil alih semua datanya sama orang tersebut.

750. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:00]

Oh, jadi petugas resmi PPD distrik itu (...)

751. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:11:05]

Ya, Yang Mulia.

752. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:05]

Itu tidak berfungsi, tapi digantikan oleh (...)

753. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:11:09]

Langsung (...)

754. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:10]

Petugas dari KPU?

755. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:11:11]

Ya.

756. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:11]

Tapi staf KPU?

757. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:11:11]

Diambil semua datanya. Ya.

758. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:14]

Oh, nanti direaksi itu KPU (...)

759. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:11:16]

Kebetulan juga nanti (...)

760. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:16]

Kenapa begitu?

761. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:11:17]

PPD-nya bisa kami hadirkan, Yang Mulia. Memang kejadiannya adalah seperti itu.

762. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:24]

Ya.

763. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:11:25]

Terus, Yang Mulia. Mungkin Prinsipal kalau mau menambahkan, boleh?

764. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:30]

Sudah diwakilkan, kok.

765. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:11:31]

Oh, baik. Kalau gitu, Yang Mulia (...)

766. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:34]

Kalau Prinsipal ... anu sendiri, nanti honorinya malah dipotong, nanti.

767. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:11:38]

Baik, Yang Mulia. Yang Mulia, untuk yang selebihnya dianggap dibacakan?

768. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:44]

Ya, Petitemnya sekarang.

769. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:11:47]

Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 1342 Tahun 2024 pen ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024 ... Tahun ... pada tanggal 6 Desember 2024, pukul 20.25 WIT.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024 dalam Keputusan KPU

Kabupaten Tandrauw tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tandrauw Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut.

770. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:32]

Ya.

771. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:12:33]

Pertama. Yohanes Yembra, Petrus Ye ... Yewen=3 ... 3.267 suara.

772. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:40]

Ya. Terus.

773. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:12:41]

Kedua. Yeskiel Yesnath dengan Paulus Ajambuani dengan suara 4.453.

774. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:51]

Ya.

775. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:12:51]

Ketiga. Thomas Kofiaga-Pieter Mambrasar dengan suara 6.408.

776. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:58]

Oke.

777. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:12:58]

Empat. Niko Anari, S.E.-Dra. Maria Agnes Hae, M.Si., dengan suara 3.319.

Lima. Ha ... Hans Paraibabo dengan Harun Bonepai dengan suara 26 ... 2.687.

Total suara sah 20.134.

4. Memerintahkan kepada (...)

778. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:26]

21.000 berapa?

779. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:13:27]

134.

780. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:29]

134. Itu suara sah, ya?

781. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:13:33]

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Tambrauw dengan berdasarkan pada daftar pemilihan tetap yang telah diperbaiki.
5. Mempe ... memerintahkan kom ... kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw untuk melaksanakan putusan ini.
Atau apabila mahkom ... Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

782. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:57]

Ya. Kalau saya tanya dulu. DPT-nya yang se ... betul berapa menurut Pemohon?

783. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:14:05]

Dua ra ... 20.134, Yang Mulia.

784. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:08]

Oh, 21.134?

785. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:14:10]

20.134.

786. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:13]

20.134?

787. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:14:34]

134, ya. Sesuai dengan BPS, jumlah penduduk di BPS.

788. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:19]

Tapi perolehan suaranya, berapa?

789. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:14:21]

Yang menurut Pemohon memang 2 ... totalnya 20.134.

790. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:26]

Ini berarti ... anu ... ini ... semuanya memilih berarti, ini? Malah berlebih, kan? Ha?

791. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:14:33]

Ya. Kalau di C-1 sama D. Hasil Tambrauw memang keseluruhan memilih, Yang Mulia. Total menurut (...)

792. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:42]

Ini ada kelebihan 1.000, berarti?

793. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:14:43]

Ya, Yang Mulia.

794. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:46]

Ha? Kok bisa?

795. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:14:48]

Ya. DPT yang ditentukan sama KPU kan 22.000, Yang Mulia. 2000 ... 22.766.

796. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:56]

Lah, ya, sekarang kalau menurut Pemohon, DPT-nya berapa?

797. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:15:00]

20 ... eh, maaf, 20.525.

798. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:05]

Berubah lagi.

799. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:15:06]

Maaf, Yang Mulia. Salah ... salah baca tadi.

800. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:09]

Ulangi ... ulangi yang betul.

801. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:15:10]

20.525.

802. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:13]

20.525?

803. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:15:14]

25.

804. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:15]

Ini, DPT?

805. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:15:16]

Ya.

806. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:17]

Terus menurut Saudara, Pemohon (...)

807. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:15:21]

He em.

808. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:21]

Suara sahnya berapa?

809. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:15:23]

20.134, Yang Mulia.

810. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:25]

20.134?

811. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:15:27]

Ya.

812. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:28]

Tadi katanya 21.134.

813. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:15:30]

20.134, Yang Mulia.

814. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:32]

Oh, berarti ada yang tidak memilih dong kalau begitu, benar?

815. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:15:36]

Ya, Yang Mulia.

816. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:37]

Tadi kelebihan 1.000. Ya, sudah.
Prof. Enny ada, Prof? Cukup.
Yang Mulia, ada? Cukup.
Baik, ada lagi yang akan disampaikan?

817. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:15:47]

Tidak, Yang Mulia.

818. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:00]

Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-37?

819. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:16:04]

Benar, Yang Mulia.

820. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:05]

Ya, sudah diverifikasi, disahkan. P-1 (...)

821. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:16:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

822. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:10]

P-1 sampai dengan P-37.

KETUK PALU 1X

Terus kemudian, kartu tanda anggota yang baru, nanti di anu, ya (...)

823. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:16:21]

Sudah, Yang Mulia. Tadi sebelum persidangan dimulai.

824. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:23]

Oke, sudah.

825. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:16:23]

Tadi bareng sama yang sidang sebelumnya.

826. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:27]

Yang diserahkan hanya satu orang (...)

827. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:16:30]

Ya.

828. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:30]

Yang lain belum itu.

829. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:16:31]

Oh, ya, Yang Mulia.

830. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:32]

Ya.

831. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:16:32]

Ya, Yang Mulia.

832. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:33]

Terus Pihak Terkait juga, Pihak Terkait, tanda ... kartu tanda anggotanya sudah kedaluwarsa, nanti yang baru, ya. Baik.

Kayaknya yang perkara ini tadi heboh jadinya, nih.

833. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:16:54]

Terima kasih, Yang Mulia.

834. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:56]

Ya, terima kasih atas penghebohannya.

Sekarang Perkara 215, siapa 215? Oh, belakang. Bergeser, supaya ada pemerataan masuk Tv, yang di depan bergeser dulu, satu orang saja cukup, ya.

835. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:17:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Sip (...)

836. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:47]

Walaikumsalam. Sebentar, sebentar.

837. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:17:50]

Siap.

838. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:51]

Perkara 215, ya?

839. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:17:53]

Betul, Yang Mulia.

840. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:54]

Suaranya bagus ini kalau nyanyi, ini. Apalagi (...)

841. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:17:57]

Pasti, Yang Mulia.

842. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:58]

Memang penyanyi, ya?

843. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:18:00]

Oh, tidak, Yang Mulia.

844. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:01]

Oh, saya kira penyanyi. Kalau nyanyi, bagus, apalagi lagu-lagu jazz. Cocok itu lagunya. Atau kalau enggak, lagunya ... lagu genre blues. Blusukan. Ya, silakan.

845. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:18:18]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Sebelum saya membacakan Permohonan, Yang Mulia. Saya ingin menyikapi terkait dengan kemarin kita juga melakukan perbaikan. Permohonan kita itu masuk di tanggal 10.

846. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:35]

Ya.

847. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:18:36]

Dan kemudian perbaikan juga masuk di tanggal 13.

848. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:39]

Ya.

849. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:18:39]

Tentunya kan, ini ada perbedaan persepsi terkait dengan 3 hari waktu untuk memasukkan perbaikan. Olehnya itu, pada kesempatan ini, agar tidak membuang waktu lagi, terkait dengan perbaikannya kami anggap kami cabut dan kami kembali kepada Permohonan awal, Yang Mulia.

850. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:59]

Oke, jadi yang digunakan adalah Permohonan awal, ya?

851. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:19:05]

Baik, Yang Mulia.

852. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:05]

Oke, baik. Silakan, Permohonan awal disampaikan.

853. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:19:14]

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Jumat, pukul 20.25 WIT.

Kepada yang dihormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi di Jalan Merdana Merdeka (...)

854. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:38]

Itu dianggap dibacakan.

855. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:19:39]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

856. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:41]

Ya.

857. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:19:43]

Dengan hormat, bersama ini kami pi ... Pasangan Calon Yohanes Yembra dan Petrus Yewen, selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

858. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:49]

Ya, itu Nomor Urut (...)

859. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:19:52]

Terkait dengan (...)

860. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:53]

1, ya?

861. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:19:53]

Ya, Yang Mulia.

862. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:54]

Ya.

863. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:19:55]

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon izin dianggap dibacakan. Kemudian terkait dengan (...)

864. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:00]

Kemudian, Tenggang Waktunya masih (...)

865. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:20:00]

Kemudian, terkait dengan Tenggang Waktu yang tadi sudah kita sampaikan, mohon agar dianggap dibacakan.

866. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:03]

Masih? Ya.
Terus, Legal Standing-nya?

867. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:20:08]

Selanjutnya, terkait dengan Legal Standing atau Kedudukan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan Pemohon ini, Yang Mulia, kami dari Pemohon memang untuk selisihnya itu, dia sudah tidak masuk dalam Pasal 158.

868. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:24]

Ya.

869. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:20:25]

Akan tetapi, menurut Pemohon ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat (...)

870. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:30]

TSM?

871. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:20:31]

TSM. Sehingga ... oleh karenanya, mohon untuk pasal tersebut dikesampingkan.

872. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:36]

Ya. Terus? Sekarang masuk Pokok Permohonan.

873. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:20:41]

Masuk Pokok Permohonan, Yang Mulia.

874. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:44]

Ya. Masuk Pokok Permohonan. Kenapa disebut pelanggaran-pelanggarannya TSM, itu apa saja?

875. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:20:52]

Begini, Yang Mulia. Ada beberapa peristiwa, dimana ada pencoblosan yang dilakukan secara noken, Yang Mulia, dan ini ada videonya. Padahal di Tambrauw itu, proses pemilihan itu tidak dilakukan secara noken. Itu yang pertama, Yang Mulia.

Terus, yang kedua (...)

876. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:10]

Ini ... Ini bisa ditunjukkan di mana saja ini, noken ini? Distrik ke mana saja?

877. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:21:17]

Ada di beberapa ... tidak semuanya, Yang Mulia.

878. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:19]

Ya, ada beberapa distrik yang (...)

879. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:21:21]

Ada di beberapa TPS, Yang Mulia, dan itu ada di bukti tambahan kita di P-4, P-5.

880. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:26]

Oh. Ada di beberapa TPS, ya?

881. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:21:28]

Betul, Yang Mulia.

882. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:29]

Tidak sampai beberapa distrik?

883. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:21:32]

Kalau di videonya, video yang kita sudah sampaikan itu hanya di beberapa TPS, Yang Mulia.

884. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:37]

Oh, di beberapa TPS?

885. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:21:39]

Betul, Yang Mulia.

886. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:40]

Oke. Jadi, tidak sebagaimana one man one vote, tapi dilakukan sebagaimana kaya noken itu?

887. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:21:48]

Betul, Yang Mulia.

888. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:49]

Oke, terus? Apa lagi?

889. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:21:50]

Terus, kemudian yang berikutnya bahwa ada intervensi dari beberapa wilayah distrik. Beberapa ketua distrik ini menyarankan untuk masyarakat memilih salah satu Paslon tertentu, yaitu Paslon Nomor Urut 2, Yang Mulia.

890. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:06]

Oke, Paslon Nomor Urut 2.

891. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:22:08]

Betul.

892. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:08]

Itu ada intervensi?

893. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:22:10]

Ada intervensi, Yang Mulia.

894. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:12]

Yang intervensi siapa itu?

895. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:22:13]

Kepala distrik dan ketua pemuda setempat, Yang Mulia, di (...)

896. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:15]

Oke. Jadi, mengarahkan untuk mencoblos pasangan tertentu, ini?

897. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:22:19]

Betul, Yang Mulia.

898. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:20]

Itu di berapa distrik?

899. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:22:23]

Ada di (...)

900. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:26]

Atau berapa TPS?

901. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:22:27]

Sebentar, Yang Mulia.
Ada di Distrik Tobouw (...)

902. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:31]

Ya.

903. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:22:32]

Terus kemudian di Distrik Miyah Selatan, Yang Mulia.

904. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:35]

Ya.

905. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:22:41]

Di dua distrik itu, Yang Mulia.

906. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:42]

Oh, hanya dua distrik?

907. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:22:43]

Siap.

908. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:43]

Ya. Terus, apa lagi?

909. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:22:46]

Terus, kemudian ada pj bupati yang menurut Pemohon mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu Paslon tertentu dan ini ada videonya juga, dimana di apel yang bersangkutan juga, sebelum selesai penghitungan suara sudah menyampaikan terkait dengan

pemenangan salah satu Paslon. Namun, sebelumnya didahului juga, beliau ini mengarahkan di apel juga untuk memilih salah satu Paslon.

Demikian, Yang Mulia. Untuk selanjutnya mungkin kita langsung ke Petitem, Yang Mulia.

910. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:23]

Ya. Jadi, ada 3 dalil tadi, ya?

911. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:23:24]

Siap.

912. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:25]

Intervensi aparat dan pemuda (...)

913. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:23:28]

Siap, Yang Mulia.

914. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:30]

Kemudian, pj bupati tidak netral (...)

915. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:23:33]

Siap.

916. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:34]

Dia mengarahkan sesuatu dan ada beberapa TPS yang pemilihannya menggunakan noken. Itu dalil-dalilnya?

917. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:23:39]

Betul, Yang Mulia.

918. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:40]

Nah, sekarang Petitemnya. Silakan.

919. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:23:42]

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat, pukul 20.25 WIT.
3. Memerintahkan kepada KPU Tambrauw untuk melaksanakan pemungut ... izin, Yang Mulia, kalau diberikan kesempatan atau berkenan, kami ingin renvoi terkait dengan *pemungutan*, diganti dengan *pemilihan*.

920. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:25]

Waduh, itu ... ya ... ya, dianu saja ... direnvoi saja, tapi nanti kita nilai, ya.

921. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:25:31]

Siap. Baik, Yang Mulia.

922. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:32]

Jadi, itu yang di situ tertulis apa?

923. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:25:35]

Pemungutan, Yang Mulia.

924. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:35]

Pemungutan?

925. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:25:37]

Ya, diganti dengan *pemilihan*, Yang Mulia.

926. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:39]

Oke. Dibacakan, coba.

927. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:25:43]

Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Tambrauw untuk melaksanakan pemilihan suara ulang pada semua TPS di Kabupaten Tambrauw dan/atau setidaknya me ... melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 01 Kampung Barar, Distrik Kwoor, TPS 01 Kampung Mega, Distrik Moraid, Distrik Bamusbama (semua TPS), Distrik Tobouw (semua TPS), dan Distrik Miyah Selatan (khususnya Kampung Sahae).

Empat. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

928. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:22]

Baik, terima kasih.
Prof. Enny, silakan.

929. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:26:27]

Ya, sedikit saja. Tadi Saudara minta renvoi, ya (...)

930. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:26:31]

Betul, Yang Mulia.

931. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:26:32]

Walaupun nanti kami yang akan menilai dan nanti silakan ditanggapi oleh Para Pihak.

932. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:26:35]

Siap.

933. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:26:36]

Yang Saudara maksud pemilihan itu, pemilihan ulang, maksudnya?

934. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:26:39]

Betul, Yang Mulia.

935. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:26:41]

Jadi, seluruh proses?

936. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:26:41]

Karena kalau ... kalau ... karena kalau sudah dibatalkan, tentunya kan harus ada pemilihan ulang, Yang Mulia.

937. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:26:46]

Belum tentu, lihat dulu.

938. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:26:48]

Siap.

939. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:26:49]

Ini Saudara minta pemilihan ulang, itu berarti seluruh proses diulang dari awal?

940. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:26:55]

Tidak seluruh proses, Yang Mulia, hanya pada pemilihannya saja.

941. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:27:02]

Ya, sudah nanti ... jadi, yang Saudara maksudkan di situ?

942. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:27:04]

Siap, siap.

943. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:27:05]

Kemudian, yang beberapa TPS itu yang Saudara maksudkan dengan PSU (Pemungutan Suara Ulang) itu?

944. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:27:09]

Ya, siap, siap.

945. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:27:10]

Ya, ini nanti memberi kesempatan yang lain untuk menanggapi secara komprehensif soal itu, ya. Terima kasih.

946. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:16]

Ya. Jadi, pemilihan dan pemungutan suara ulang itu kan beda, ya.

947. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:27:21]

Betul.

948. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:21]

Jadi, silakan ditanggapi itu, gimana itu.

Baik. Saudara pada waktu menyerahkan soft copy menggunakan versi yang lain. Ini bisa versi Word saja, ya?

949. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:27:34]

Gimana, Yang Mulia?

950. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:37]

Ini versi soft copy-nya nanti diurus di bawah.

951. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:27:41]

Siap, Yang Mulia.

952. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:41]

Ya. Kemudian, Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-7?

953. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:27:46]

Betul, Yang Mulia.

954. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:47]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Terus Pihak Terkait, KTA-nya juga sudah kedaluwarsa, nanti yang ba ... baru, ya? Ya.

955. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:28:00]

Izin, Yang Mulia. Kalau untuk bukti, nanti kita ada tambahan lagi kalau diperkenankan.

956. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:04]

Boleh, silakan. Bukti tambahan masih dimungkinkan sampai besok pagi, pukul 12.00 siang.

957. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:28:09]

Baik, Yang Mulia.

958. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:10]

Karena setelah itu, sore, Para Pihak yang lain supaya bisa melakukan inzage, tapi inzage-nya dengan mengajukan Permohonan secara tertulis, ya.

Baik. Cukup?

959. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:28:24]

Cukup, Yang Mulia.

960. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:25]

Baik. Kalau cukup, itu dimatikan. Nah, kalau dihidupkan terus, nanti kalau rusak, tanggung jawab. Itu namanya merusak aset negara itu.

Baik. Ini penundaan sidang saya umumkan. Oke. Yang terakhir, 142, ya? Baik. 142 ini Pemohon enggak ada, kan? Ditarik? Ada surat penarikannya? Mana?

Jadi Perkara 142 itu Pemohonnya adalah Perhimpunan Pemilih Indonesia (Indonesian Voters Association). Menyatakan Permohonan ini dicabut, tertanggal surat 10 Januari 2025 perihalnya Pemberitahuan Pencabutan Berkas Perkara Nomor 142. Jadi, sudah dibacakan di sidang yang terbuka untuk umum, maka nanti akan kita laporkan bahwa Perkara 142 dianggap telah dicabut. Terima kasih.

Sekarang penundaan jadwal sidang. Agenda penundaannya itu akan mendengarkan bersama-sama jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu. Seluruh dokumennya itu harus diserahkan 1 hari sebelum hari jadwal sidang. Kalau di sini berarti Tanggal 30 masih memungkinkan, ya? Baik.

Untuk Perkara 241, 185, 238 ditunda Jumat, 31 Januari 2025, pada pukul 13.30.

Kemudian, untuk Perkara 231 dan 215 ditunda pada 31 Januari 2025, pada pukul 08.00 pagi, ya.

Ini dianggap sebagai panggilan sidang resmi. Ada yang mau ditanyakan Pemohon, cukup?

961. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:30:03]

Cukup, Yang Mulia.

962. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:04]

Termohon, cukup?

Bawaslu cukup, ya? Apa yang harus direspons sudah diketahui semua.

Pihak Terkait juga, cukup ya? Ada yang mau ditanyakan?

963. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: MOHAMMAD TUHRI LEISUBUN [01:30:16]

Ada, Pak. Terkait dengan kedaluwarsanya KTA, apakah bisa menggunakan suket atau sulit keterangan?

964. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:21]

Ya, boleh, silakan.

965. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: MOHAMMAD TUHRI LEISUBUN [01:30:21]

Terima kasih.

966. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:24]

Ya. Tapi kenapa enggak ngurus perpanjangan saja, kenapa? Biayanya mahal? Belum dapat honor? Ya, ya, sudah.

Jadi sudah semua, sudah paham. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.35 WIB

Jakarta, 16 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

